

# **TEMAN – TEMAN SURABAYA GOOD AFTERNOON !!**

Sesi 3 : Surabaya, 2 September 2016  
Hotel IBIS

# AGENDA FOR TODAY

2 September 2016

- Opening & AEoI : Tri Djoko Santoso CFP
- Tax Amnesty 1 – Dedy Sidarta, CFP, SE, BKP
- Diskusi dan Tanya Jawab

Slide presentation dan peraturan terkini dapat di download di :

[www.fpsbindonesia.net](http://www.fpsbindonesia.net)

# AGENDA FOR TODAY

## 2 September 2016

- Opening & AEol : Tri Djoko Santoso CFP
- Tax Amnesty 1 – Dedy Sidarta, CFP, SE, BKP
- Diskusi dan Tanya Jawab

Pastikan Anda (CFP dan RFP Member)  
Menandatangani absen untuk CPD Anda

# FASILITATOR

## **Tri Djoko Santoso CFP**

Pendiri dan Ketua LSP FPSB Indonesia

Pendiri dan Direktur LN CONSULTING

Spesialisasi : Wealth Educator for Indonesian family  
with asset ofshore

## **Dedy Sidarta, CFP, SE, BKP.**

Pendiri dan CEO D'Consulting Business Consultant

Certified Tax Consulting from IKPI

Certified ERP Consultant



"Tentunya *Tax Amnesty* harus dilakukan sebelum Automatic Exchange of Information tersebut. Sehingga itu juga memberikan kemungkinan wajib pajak untuk mengungkapkan semua harta kekayaannya“

Bambang mengatakan, penerapan Automatic Exchange of Information memunculkan konsekuensi tidak adanya lagi kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan.

Selain itu, konsep keterbukaan informasi ini akan menghindarkan praktik *base erosion and profit shifting*. "Maka istilahnya di dunia ini tidak ada lagi tempat untuk sembunyi. *No place to hide*," ucap Bambang



Pengampunan pajak merupakan kesempatan bagus sebelum era keterbukaan informasi di semua negara pada 2018. Awal 2018, semua negara buka-bukaan, nanti orang akan tahu.

Presiden Djoko Widodo  
Surabaya, 15 Juli 2016

Dengan mengungkapkan harta yang disimpan sekarang (Tax Amenity), pengusaha memperoleh penghapusan tunggakan pajak serta pembebasan sanksi administrasi, pidana perpajakan, dan lain-lain.

# TIDAK RELEVAN BICARA TENTANG TAX AMNESTY TANPA MELIBATKAN AEOI

## **Disclaimer**

TRI DJOKO SANTOSO bukan seorang yang mempunyai kualifikasi pajak baik lokal maupun global. Anda direkomendasi mencari informasi lebih detil dari para ahli/konsultan pajak.

AEOI

***NO WHERE TO RUN  
NO PLACE TO HIDE***

Automatic Exchange of Information



# PRESENTASI INI BERTUJUAN MEMBERIKAN PEMAHAMAN RINGKAS TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PAJAK AEiO DAN KAITANNYA DENGAN TAX AMNESTY INDONESIA.

## Referensi:

- OECD Standard for AEoI – tax matters
- EY – International tax Alert, OECD CRS -The Global FATCA-Like Regime
- KPMG Intl. Automatic Exchange of Information
- PP Menteri Keuangan RI NO. 125/PMK.010/2015
- Materi dari pertemuan para Global Wealth Manager di SGP

# GLOBAL TAX TRANSPARENCY

**NOW**

**TAX AMNESTY  
2016 – March 2017**



- Anda
- Sukarela / Hak / Pilihan
- Melapor/Mengungkapkan
- Harta/Asset yang belum dilaporkan
- Dimanapun berada
- Membayar tebusan

**2018**

**AEoI  
2018**



- Lembaga Keuangan
- Melaporkan data Anda
- Dan Asset Financial Anda
- Kepada otoritas pajak
- Di yurisdiksi tertentu
- Wajib –standard – Otomatis
- Shared



Reportable Person

# AGENDA

- ❑ Tentang OECD
- ❑ Tentang CRS, FATCA dan AEI Within EU
- ❑ Tentang AEoI
- ❑ Tentang kesiapan Indonesia menghadapi AEoI
- ❑ Tentang inisiatif Pengampunan Pajak Indonesia
- ❑ Tantangan bagi Global Client Indonesia

# **Global Implementation of the OECD's Standard for Automatic Exchange of financial Account Information (The Standard)**

- ❑ OECD bertindak atas dasar endorsemen dari berbagai lembaga internasional termasuk G8, G20, Gubernur Bank Sentral dan didukung oleh lebih dari 101 negara.
- ❑ Deklarasi 6 Mei 2014

# The Standard

- ❑ The Standards mendasari keterbukaan informasi rekening keuangan antar negara, dan melingkupi aturan-aturan detail dalam CRS (Common Reporting Standards)
- ❑ Tidak saja mengidentifikasi lembaga keuangan yang wajib melapor namun juga jenis/bentuk laporan keuangan yang dibuka.
- ❑ Mekanisme dan basis informasi keuangan tersebut akan “dipertukarkan” secara otomatis antar negara

# The Standard

□ CRS memerlukan peraturan pelaksanaan di setiap negara, sejalan dengan perjanjian antara setiap negara yang dikenal sebagai *competent authority agreements*, agar bisa melaksanakan secara penuh “the standard”

# COMMON REPORTING STANDARD | CRS

- ❑ Merupakan langkah besar menuju “ a globally coordinated approach to disclosure of income earned by individuals and organizations” .
- ❑ Melawan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan bentuk lain dari *non-compliance*.
- ❑ Dibangun melalui peraturan pertukaran informasi seperti FATCA (The United States Foreign Account Tax Compliance Act dan EUSD (The European Union savings Directive)

# THE 4 BASIC PROCESS | CRS

**Step1** | Identifikasi Lembaga Keuangan, yang terdiri antara lain :

- Banks
- Perusahaan “Trust”
- Custodial Institutions
- Funds and Fund Managers
- Perusahaan Asuransi

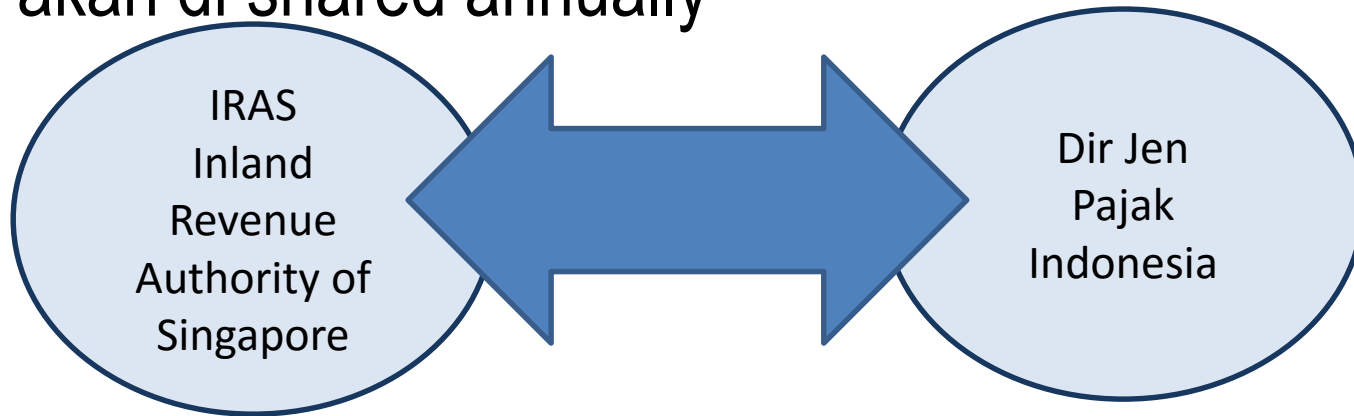


# REPORTING ENTITIES (FINANCIAL INSTITUTIONS)

- ❑ **Depository institutions:** entities that accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business
- ❑ **Custodial institutions:** entities that hold, as a substantial portion of their business, financial assets for the account of others
- ❑ **investment entities:** entities: (i) whose primary business involves certain asset management or financial services for or on behalf of a customer; or (ii) whose gross income is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in financial assets, if the entity is managed by another financial institution
- ❑ **Specified insurance companies:** insurance companies that issue or are obligated to make payments for cash value insurance contracts or annuity contracts.
- ❑ **Financial institutions with a local client base**
- ❑ **Local banks**
- ❑ **Certain retirement funds**
- ❑ **Financial institutions with only low value accounts**
- ❑ **Sponsored Investment vehicles**
- ❑ **Some investment advisors and investment managers**
- ❑ **Certain investment trusts.**

# REPORTABLE ACCOUNT | CRS

Ketika sebuah rekening adalah **Reportable Account** informasi tentang nasabah berikut akan dilaporkan oleh Lembaga Keuangan kepada Otoritas pajak dan selanjut akan di shared annually



- Nama, alamat, tgl lahir
- Rekening detail dan lembaga keuangan terkait
- Bunga, dividen dan penghasilan yang diterima
- Account balance dan nilai akhir tahun**
- Income/sale or redemption Proceeds
- Gross interest received on depository account



# REPORTABLE ACCOUNT | CRS

Mensyaratkan Lembaga-lembaga Keuangan tersebut untuk meninjau, memeriksa, memilah, mengkategorikan pemegang rekening keuangan nasabah mereka.

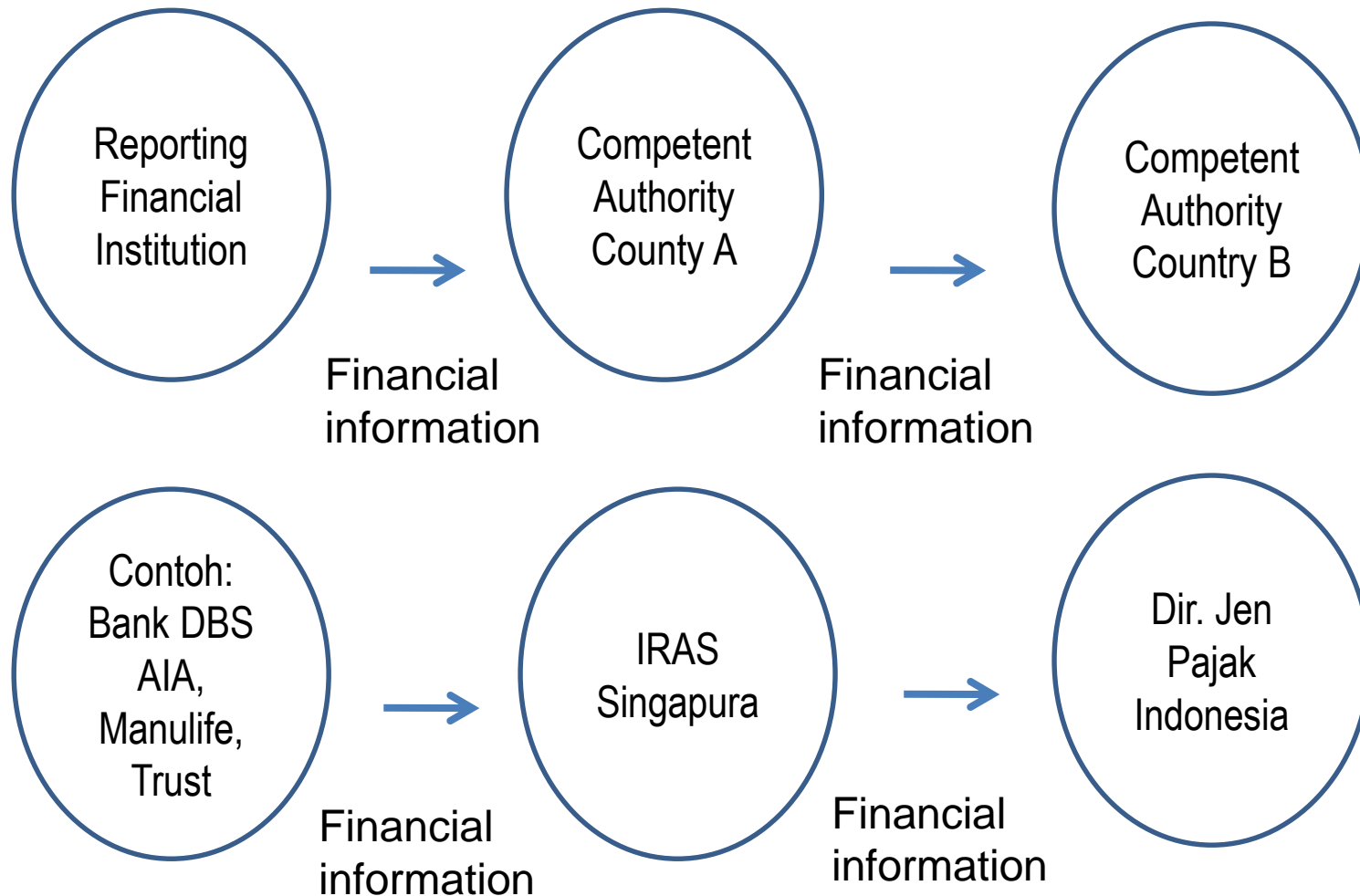
Kategori dapat dibagi antara rekening pribadi dan rekening entitas. Akun/rekening entitas mengacu pada rekening yang dimiliki oleh perusahaan (dan SPV), Trust atau Foundation.

Rekening yang selanjutnya terbagi antara rekening existing dan rekening baru.

# THE BASIC PROCESS | CRS

**Step 2** | setelah **Reportable Account** dapat diidentifikasi, informasi nasabah dan rekening financial tersebut dipersyaratkan untuk dilaporkan kepada otoritas yang berwenang. Di Singapura, misalnya adalah IRAS (Inland Revenue Authority of Singapore).

# FINANCIAL ACCOUNT AUTHOMATIC REPORTING MECHANISM



# REPORTABLE ACCOUNT | CRS

Asuransi

Account balance atau nilai akhir tahun termasuk:  
Kontrak asuransi dengan nilai tunai dan Anuitas.

Contoh

Kontrak Asuransi dengan Nilai Tunai  
Insurance Contract with Cash Value

Singapura  
Universal Life  
Variable Life  
Universal Variable Life  
Whole life  
Endowment  
others

Indonesia  
Level term  
Unit link  
Whole life  
Endowment  
DII

# THE BASIC PROCESS | CRS

**Step 3** | Otoritas yang berwenang dalam negeri (Misalnya Otoritas Pajak Indonesia) akan menyusun semua informasi rekening keuangan (domestik dan hasil pertukaran) dan kemudian menukarkan rekening konsolidasi tersebut dengan mitra otoritas pajak yang relevan secara otomatis setiap tahun.

# THE BASIC PROCESS | CRS

**Step 4** | Otoritas pajak penerima kemudian akan berada dalam posisi untuk melakukan rekonsiliasi informasi rekening yang diterima dari semua wajib pajak terkait :

- Asset
- Income
- dan laba



# KESIAPAN INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR [125/PMK.010/2015](#)

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR [60/PMK.03/2014](#) TENTANG TATA CARA PERTUKARAN  
INFORMASI (EXCHANGE OF INFORMATION)

Catatan : PMK Nomor 125/PMK.010/2015 telah mengatur tentang tata cara Pertukaran informasi sesuai dengan peraturan global

# POLIS UNIT LINKED DALAM TAX AMNESTY

Beli Menggunakan	Dicatatkan Dalam	Ikut
Penghasilan After Tax	SPT	Tax Amnesty
Ya	Ya	Tidak
Ya	Tidak	Tidak, revisi SPT
Tidak	Tidak	Ya

Sumber :

- Posisi beberapa perusahaan asuransi jiwa atas dasar rekomendasi firma konsultan pajak (the big 4).
- Nilai Tunai Unit Linked status 31 Desember 2015, (jumlah unit x NAB).
- Belum ditemukan aturan tertulis yang seragam dari Dir.jen Pajak dan OJK

# LEARNING CASES

## LANGKAH CERDIK ORANG KAYA



**STRATEGI ASSET 1 :**  
BISNIS PAKAI UANG ORANG

**STRATEGI ASSET 2 :**  
UANG KECIL BIKIN UANG BESAR

**STRATEGI ASSET 3 :**  
PORTFOLIO ASSET & LEGAL TAX PLANNING

## **PERATURAN YANG BARU DI RELEASED**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR 11/PJ/2016  
TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK  
*(Bagi petani, nelayan, pensiunan)*

PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI  
NOMOR 127/PMK.010/2016  
TENTANG PENGAMPUN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG  
MEMILIKI HARTA TIDAK LANGSUNG MELALUI  
*SPECIAL PURPOSE VEHICLE*

# LETS TALK SPT 1770

## PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI

### BAGIAN B: PENGHASILAN YANG TIDAK KENA PAJAK

1. Bantuan/Sumbangan/Hibah
2. Warisan
3. Bagian Laba Anggota Perseroan Komaditer Tidak atas Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi
4. Klaim Asuransi: Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwi Guna, Beasiswa
5. Beasiswa
6. Penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak

# LETS TALK SPT – HARTA 1770

NAMA HARTA	NAMA HARTA	KODE HARTA
Uang Tunai	sepeda	
Tabungan	sepeda motor	
Giro	mobil	
Deposito	alat transport lainnya	
Setara Kas Lainnya	logam mulia	
Piutang	batu mulia	
Piutang Afiliasi	barang seni dan antik	
Persediaan Usaha	kapal pesiar, pswt terbang	
Piutang Lainnya	peralatan elektronik	
Saham yang dibeli dijual kembali	harta bergerak lainnya	
Saham	tanah dan bangunan tempat tinggal	
Obligasi perusahaan	tanah dan bangunan tempat usaha	
Obligasi pemerintah	tanah dan lahan utk usaha	
Surat hutang lainnya	harta tak bergerak lainnya	
Reksadana	paten	
Instrumen derivatif	royalty	
penyertaan modal dlm perush	merek dagang	
investasi lainnya	harta tak berwujud lainnya	
	dst	

**TERIMAKASIH**